

PERAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU

Inkong Ala¹, DB Paranoan², Suarta Djaja³

Abstrak

Tujuan utama perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau di daerah perbatasan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan tersebut sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan lintas batas adalah faktor geografis dan topografis, faktor aksesibilitas, faktor biaya dan harga, serta latar belakang budaya dan emosional. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar, perdagangan lintas batas juga berperan dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.

Kata Kunci: *Perdagangan Lintas Batas, Infrastruktur*

Pendahuluan

Keberadaan daerah-daerah perbatasan, tertinggal atau terbelakang merupakan agenda khusus yang mestinya mendapat prioritas perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui manajemen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan (*prosperity approach*). Oleh karenanya pemerintah hendaknya berupaya keras untuk meminimalisir kesenjangan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat sebagian besar kawasan perbatasan di Kalimantan Timur yang terdiri dari: Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat masih merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas (Depdagri, Dirjen Pemerintahan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, 2005). oleh karenanya perhatian bagi kawasan perbatasan ini sejalan dengan rumusan kebijakan pemerintah terdahulu yaitu pada GBHN tahun 1999 hingga GBHN tahun 2000 yang telah

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisipol, Universitas Mulawarman

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisipol, Universitas Mulawarman

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisipol, Universitas Mulawarman

mengamanatkan bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah tertinggal yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat penanganan masalah pembangunan di kawasan perbatasan antara lain:

1. Sumber Daya manusia, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kuantitas dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang sehingga berimplikasi pada banyaknya pelintas batas ilegal (TKI ilegal);
2. Sumber Daya Buatan (prasarana) dimana tingkat pelayanannya masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi sehingga penduduk di perbatasan masih cenderung berorientasi pada negara tetangga yang tingkat aksesibilitas fisik dan informasinya relatif lebih tinggi;
3. Penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, yang ditunjukkan antara lain dengan terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan);
4. Penegasan status daerah perbatasan, yang antara lain ditunjukkan oleh masih terdapatnya beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga namun belum dimasukkan ke dalam wilayah persetujuan lintas batas oleh kedua negara;
5. Keterbatasan sumber pendanaan, dimana daerah perbatasan relatif kurang diberikan prioritas pengembangannya dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga semakin memperlebar tingkat kesenjangan antar daerah;
6. Terbatasnya kelembagaan dan aparat yang ditugaskan di daerah perbatasan, dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan tidak disertai dengan fasilitas yang memadai, sehingga banyak yang merasa tidak nyaman dan aman ketika melaksanakan tugas di wilayah perbatasan. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat setempat relatif kurang memadai. (Depdagri, Dirjen Pemerintahan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, 2005).

Selain itu, permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi di daerah perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis dan topografis yang tidak menguntungkan dan jauh dari pemukiman perkotaan (Billa, Marthin, 2005)
2. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi sehingga mengakibatkan wilayah tersebut terisolir dari orbit kegiatan ekonomi dan sosial;
3. Lemahnya sumber daya manusia yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat serta kurangnya transportasi dan komunikasi;
4. Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal, di lain pihak hasil-hasil produksi masyarakat di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota (Patton, 1999:6).

Potensi Perbatasan khususnya Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau yang dapat dijadikan peluang bagi percepatan pembangunan Infrastruktur dan ekonomi daerah adalah letaknya yang memungkinkan hubungan langsung dengan negara tetangga yang merupakan pasar potensial yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi produsen internal di daerah masing-masing, tetapi juga secara nasional. Seperti halnya perdagangan lintas batas yang sangat potensial, karena berbatasan dengan negara tetangga misalnya Kalimantan Timur (Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau) dengan Malaysia Serawak.

Dalam artian formal perdagangan lintas batas adalah kegiatan ekspor-impor antara dua daerah/wilayah di perbatasan negara yang berbeda. Keberadaannya dijamin dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi tersebut, baik perorangan maupun kelompok usaha berbadan hukum. Namun jika dilihat dalam perdagangan lintas batas yang dilakukan antara masyarakat yang ada di perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau selama ini dilakukan secara ilegal. hal ini tentu tidak menutup kemungkinan setiap produk kawasan perbatasan masuk ke negara tetangga Malaysia tanpa disertai ijin, bea masuk ataupun aturan ekspor-impor lainnya. Kegiatan semacam ini biasanya disebut ilegal atau informal karena prosedurnya di luar ketentuan formal.

Dengan melihat kondisi kegiatan perdagangan ilegal tersebut diatas, jelas sangatlah merugikan, salah satunya adalah bagi pertumbuhan di bidang perekonomian pada suatu daerah dimana transaksi perdagangan informal itu terjadi, yang apabila tidak segera ditangani secara serius dapat berdampak pada masalah stabilitas nasional.

Pada beberapa kasus yang terjadi, perdagangan lintas batas justru dianggap hal yang penting mengingat adanya faktor-faktor yang mengharuskan masyarakat di sekitar daerah perbatasan melakukan perdagangan informal tersebut.

Proses terjadinya perdagangan lintas batas ilegal di wilayah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau dan Negara tetangga Malaysia Serawak pada umumnya disebabkan oleh keadaan geografis dan topografinya, dan faktor aksesibilitas, yang mengakibatkan masyarakat di sekitar daerah perbatasan cenderung melakukan transaksi jual-beli, dalam hal ini untuk mencukupi kebutuhan akan sembilan bahan pokok dan barang lainnya dengan negara tetangga Malaysia.

Perdagangan Internasional dan Pembangunan

Pada umumnya negara berkembang justru menyandarkan pada impor bahan mentah, mesin, barang modal, barang setengah jadi, dan barang

konsumsi untuk mendorong peningkatan industri dan memenuhi tuntutan rakyat mereka (Todaro, 1990).

Proses industrialisasi di negara-negara sedang berkembang tidak berjalan sebagaimana di negara-negara maju, hal ini mengingat industrialisasi di negara-negara berkembang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan negara maju. Gagasan industrialisasi di negara berkembang tersebut dapat ditelusuri dari teori tentang pembagian kerja secara internasional dimana teori ini pula yang mendasari pentingnya perdagangan bebas yang merupakan produk pemikiran para ekonom klasik (lihat Budiman, 1995), sehingga sebenarnya antara industrialisasi dan perdagangan bebas merupakan dua hal yang sangat terkait secara teoritis.

Dalam teori ini dinyatakan tentang pentingnya spesialisasi produksi setiap negara berdasarkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Negara-negara berkembang yang memiliki tanah subur sebaiknya melakukan spesialisasi dalam produksi pertanian. Sementara itu negara-negara Utara yang iklimnya tidak cocok untuk pertanian sebaiknya melakukan kegiatan produksi di industri. Bila kedua kelompok negara tersebut mengabaikan prinsip keunggulan komparatif tersebut, maka yang terjadi adalah inefisiensi produksi.

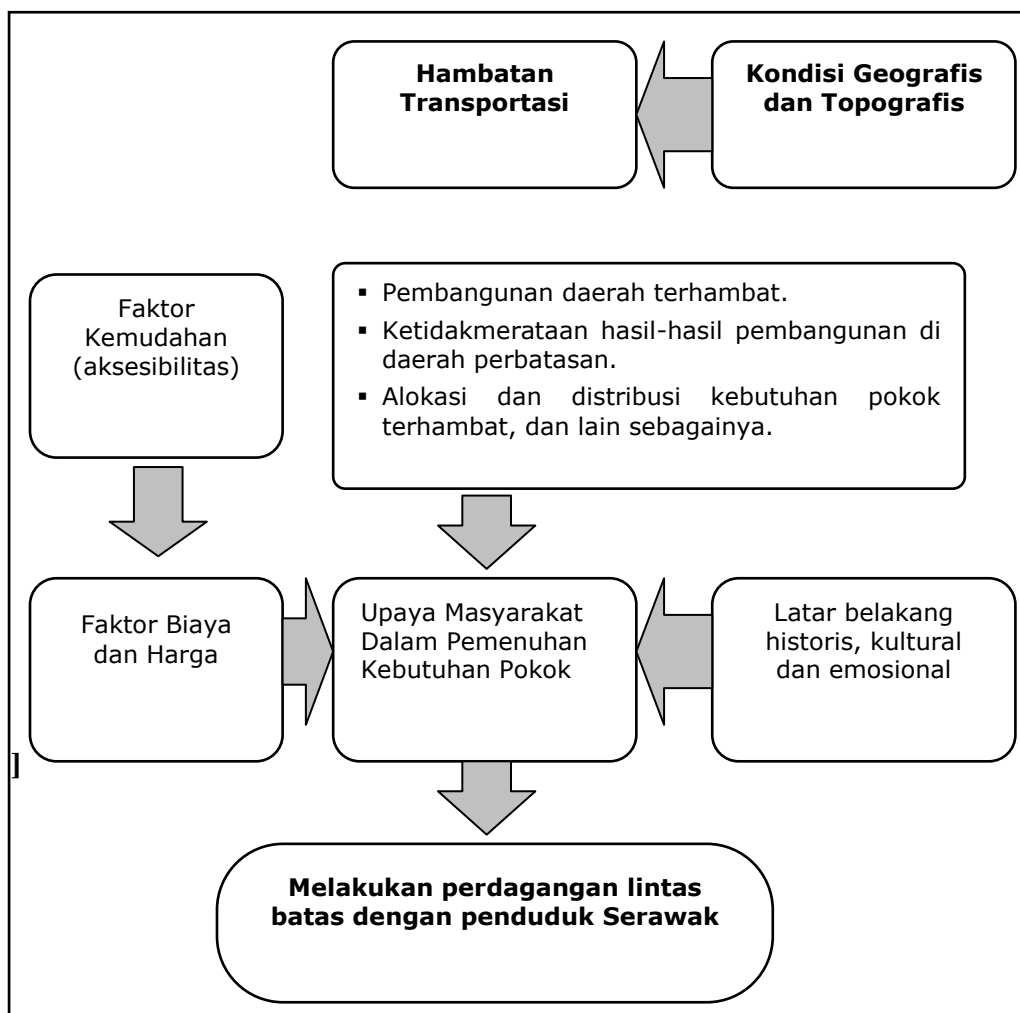
Perdagangan internasional juga memberikan manfaat bagi pembangunan. Semua dasar ekonomi perdagangan internasional didasarkan pada kenyataan bahwa negara memang berbeda-beda, baik dalam persediaan sumberdaya, kelembagaan ekonomi, sosial maupun kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang (Todaro, 1990).

Pada umumnya tata cara perdagangan dalam negeri tidak berbeda dengan perdagangan luar negeri. Hanya saja perdagangan luar negeri agak sulit dan rumit karena beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik);
- 2) Barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan misalnya peraturan pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara/pemerintah;
- 3) Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum dan usance peraturan dalam perdagangan, dan lain-lainnya (Amir, 2000).

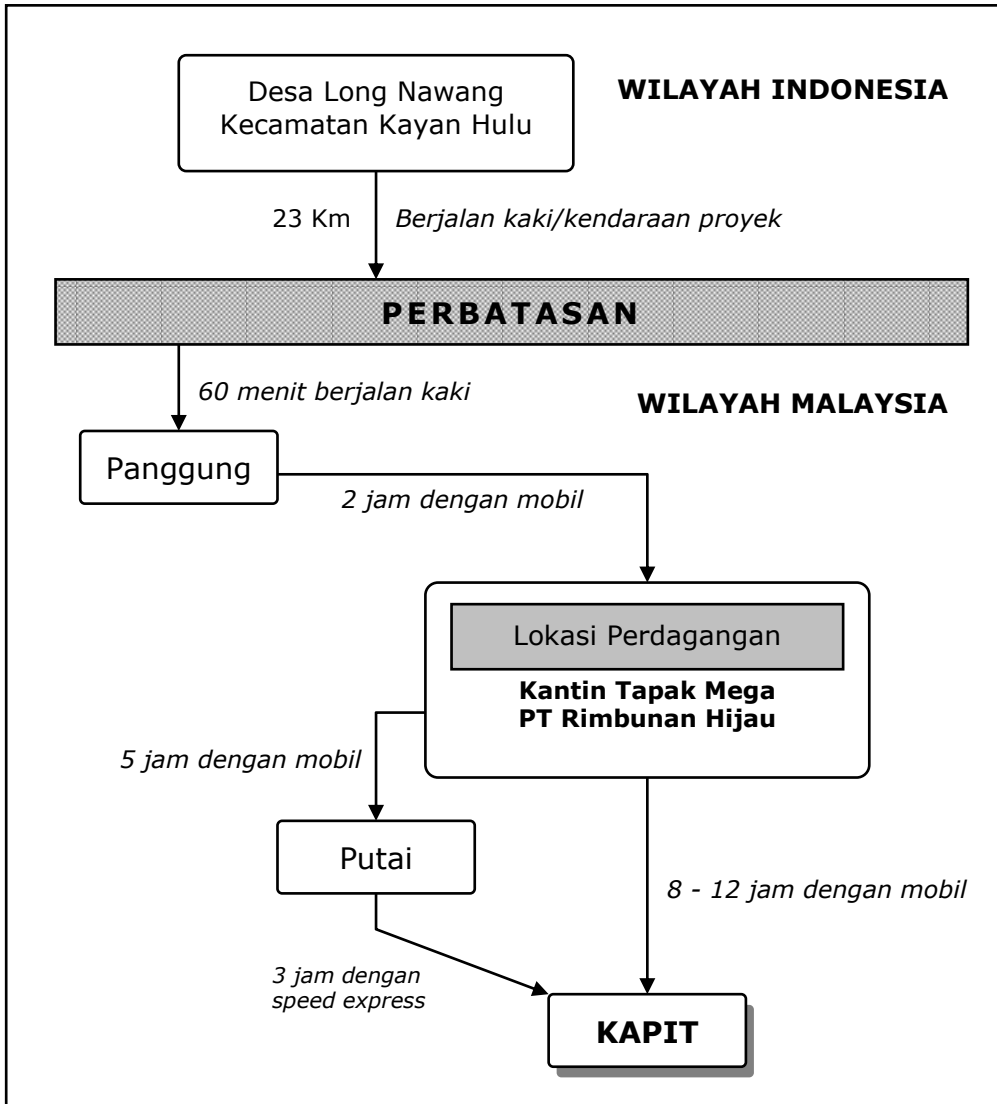
Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perdagangan Lintas Batas

Proses terjadinya perdagangan lintas batas ilegal di wilayah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau dan Negara tetangga Malaysia Serawak pada umumnya disebabkan oleh : (a) Faktor geografis dan topografisnya. Kondisi daerah yang terisolir dan sulit dijangkau. (b) Faktor aksesibilitas, masyarakat di sekitar daerah perbatasan lebih mudah ke daerah Malaysia. (c) Faktor Latar belakang budaya dan emosional, dimana masyarakat yang ada di di daerah perbatasan adalah berasal dari suku yang sama.



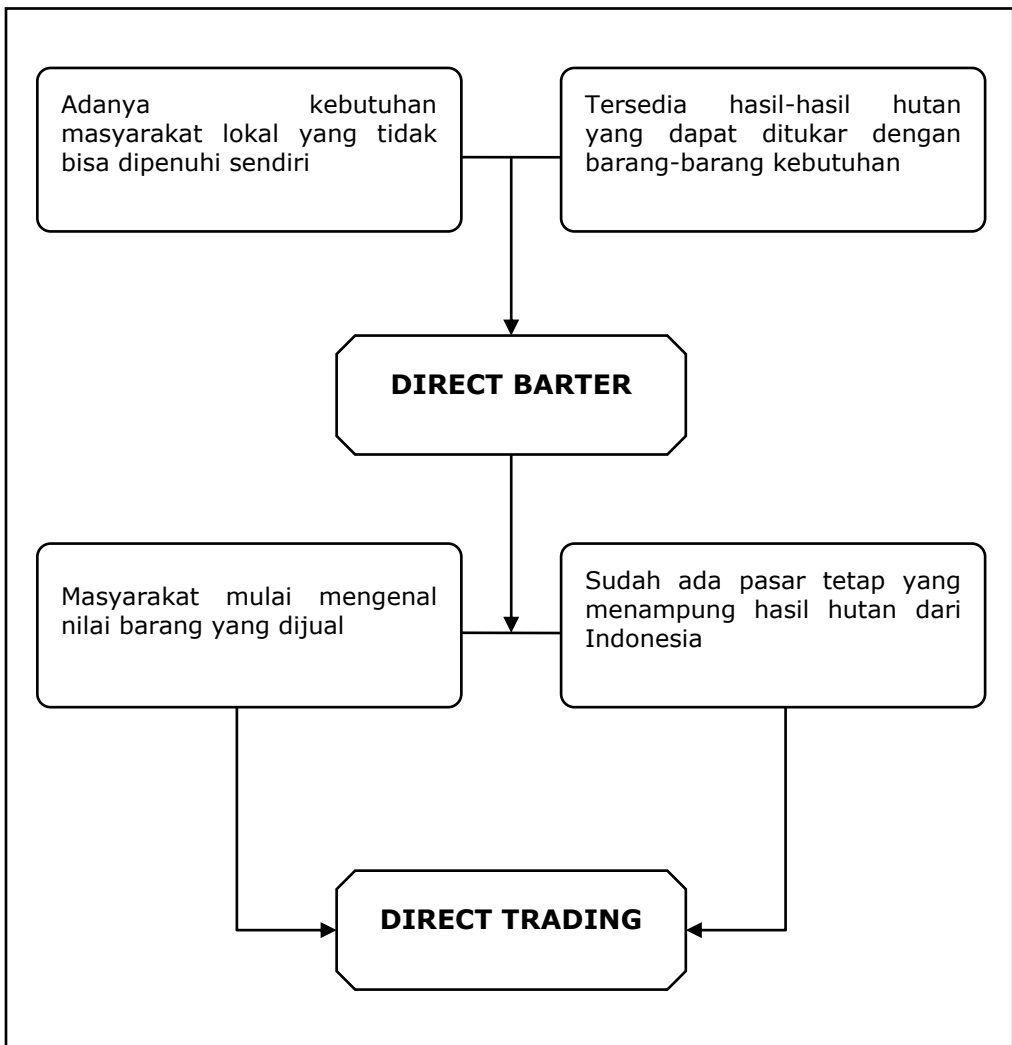
Lokasi Perdagangan Lintas batas

Meskipun kegiatan yang berlangsung adalah perdagangan lintas batas yang melibatkan masyarakat kedua negara, namun lokasi perdagangan lintas batas ini berlangsung di wilayah negara Malaysia, meskipun untuk mencapai lokasi perdagangan lintas batas harus berjalan kaki.



Pola Perdagangan Lintas Batas (dari barter hingga jual beli langsung)

Secara tradisional masyarakat Apau Kayan melakukan transaksi barter dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, aktifitas tersebut kini sudah berubah menjadi aktifitas jual beli, akan tetapi aktifitas barter masih berlangsung hingga kini jika masyarakat setempat tidak cukup uang untuk melakukan transaksi jual beli.



Implikasi Perdagangan Internasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan di sektor industri dan perdagangan tidak saja diharapkan dapat meningkatkan, memperluas dan memperbaharui upaya pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas nasional (Alam, 1996).

Secara teoritis, Todaro (1990) menjelaskan bahwa terdapat dua keuntungan besar dari perdagangan internasional. *Pertama*, perdagangan memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari keterkurungan kemampuan menyediakan sumber daya mereka dan mengkonsumsikan komoditi dalam kombinasi-kombinasi yang di luar batas kemampuan produksinya. Implikasi *kedua* adalah bahwa perdagangan bebas akan memperbesar *output* global dengan diperbolehkannya setiap negara untuk mengkhususkan diri pada yang paling baik baginya, yaitu dengan berkonsentrasi pada produksi barang yang memberikan keunggulan komparatif.

Dalam konteks ini konsep pemberdayaan terhadap kegiatan ekonomi yang telah ada dan berskala kecil (pemberdayaan ekonomi rakyat) dipadukan dengan pemberdayaan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan guna menumbuhkan ketahanan perekonomian (pemberdayaan ekonomi masyarakat). Sedangkan isu tentang ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai menggejolak awal dekade 80-90 an. Menurut Budiman (1995), gagasan ini sebelumnya sudah diperkenalkan oleh salah satu *founding father* Indonesia yaitu Bung Hatta, melalui artikel yang berjudul "Ekonomi Rakyat", dalam majalah Daulat Rakyat Nomor 84, 10 Januari 1934. Bung Hatta pada waktu itu telah menghayati suatu persepsi yang kokoh bahwa ekonomi rakyat Indonesia, yaitu unit-unit ekonomi serba kecil, termasuk pemberi jasa dalam proses produksi, yakni kaum buruh terus berada dalam posisi antara hidup dan mati (Budiman, 1995:145).

Perihal perekonomian rakyat, Kartasasmita (1996:132) mengemukakan bahwa ekonomi rakyat diartikan sebagai ekonomi usaha kecil, masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang terbuka. Sedangkan Mubyarto (1999:46) mengemukakan bahwa: "Ekonomi rakyat adalah bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya: di pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan, serta dalam perdagangan atau kegiatan "swadaya" lainnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Ekonomi rakyat bersifat sub sistem (tradisional), dengan modal utama tenaga kerja, keluarga dan modal serta teknologi seadanya."

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dapat menciptakan dan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat seperti pengusaha kecil, menengah, koperasi agar dapat tempat utama supaya dapat berkembang dengan baik, seperti yang dikemukakan berikut ini:

"Pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar mendorong dan sekaligus menampung partisipasi dan untuk kepentingan rakyat banyak, pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peranan yang lebih besar agar menjadi tulang punggung perekonomian nasional." (Anonymous, 1999:6)

Kartasamita (1996) mengemukakan ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. *Pertama*, upaya ini harus terarah (*targeted*), hal ini secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, prosedur ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai beberapa tujuan yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggung jawabkan upaya diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, serta hasil analisis data maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan perdagangan lintas batas tersebut adalah: (1) faktor kedekatan geografis dan kondisi topografis wilayah; (2) faktor aksesibilitas; (3) faktor kedekatan secara kultural dan emosional diantara kedua komunitas di perbatasan tersebut.
2. Pola perdagangan lintas batas yang berlangsung dapat diidentifikasi telah mengalami pergeseran dari pola barter menjadi pola jual-beli murni dengan menggunakan alat tukar ringgit (mata uang Malaysia). Pola perdagangan barter yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di wilayah perbatasan dengan membawa hasil-hasil pertanian, hasil hutan seperti gaharu, rotan, damar, dan lain sebagainya guna mendapatkan bahan pokok seperti gula, garam, minyak, dan lain-lain. Beralihnya pola barter menjadi jual-beli disebabkan karena: (1) tumbuhnya kesadaran masyarakat akan nilai barang-barang yang dibarter terutama hasil hutan yang nilainya relatif tinggi; (2) banyaknya tenaga kerja dari desa perbatasan yang bekerja di Malaysia dan menggunakan upahnya sebagai alat tukar jual-beli.
3. Adapun pola perdagangan lintas batas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Motif perdagangan bagi masyarakat perbatasan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok.
 - b. Bentuk perdagangan: dari pola barter ke pola jual beli murni.
 - c. Pelaku perdagangan: pedagang lokal dan perorangan.
 - d. Jenis barang: kebutuhan sembilan bahan pokok, BBM, bahan bangunan, alat komunikasi, mesin diesel, dan sepeda motor.
 - e. Volume jual beli: terbatas untuk kebutuhan sehari-hari.
 - f. Lokasi perdagangan berada di wilayah Malaysia (sekitar 23 Km dari perbatasan).
 - g. Hubungan: adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari pihak Malaysia.
4. Hasil analisis mengindikasikan adanya implikasi (positif dan negatif) pada kegiatan perdagangan lintas batas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan :
- a. Implikasi positif terkait dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (pokok) dengan cara yang relatif lebih mudah dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu yang lebih cepat dibanding bila mereka harus membeli ke Ibukota Kabupaten Malinau; Terciptanya dan meningkatnya lapangan pekerjaan bagi penduduk di desa-desa perbatasan untuk bekerja di beberapa perusahaan kayu di Malaysia; Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat. Dengan adanya aktifitas perdagangan lintas batas dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan penghasilan misalnya dengan membuka perkebunan rakyat, kerajinan tangan (*home industry*), dan lain-lain. Informasi mengenai perdagangan lintas batas yang terjadi, disamping sering dipublikasikan oleh media cetak dan elektronik, juga sering dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kaltim dalam berbagai kegiatan kerjanya, sehingga para pengambil kebijakan menjadikan daerah perbatasan masuk dalam skala prioritas pembangunan, ini dibuktikan dengan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan dari desa ke desa, desa ke kecamatan dan ke darah perbatasan Serawak Malaysia.
 - b. Implikasi negatif terkait perdagangan lintas batas diantaranya : terjadi penyelundupan berbagai jenis barang dan komoditas lainnya, serta pencurian kekayaan alam yang ada di daerah tersebut.
5. Desa-desa perbatasan yang berada di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Timur merupakan wilayah yang masih terisolir sebagai akibat dari kondisi letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan dan secara topografis merupakan wilayah pegunungan, hutan, bukit serta dilintasi beberapa sungai besar sehingga sangat

menyulitkan upaya untuk pendistribusian pasokan barang-barang kebutuhan pokok dan hasil-hasil pembangunan lainnya.

6. Karena letaknya yang berdekatan dengan wilayah Serawak Malaysia, maka masyarakat di sekitar perbatasan di kecamatan tersebut sudah sejak lama saling berinteraksi dan menjalin hubungan layaknya satu bangsa tanpa mengenal hambatan lintas negara, mereka dapat melintas keluar-masuk wilayah negara lain tanpa adanya hambatan atau pengawasan dari pihak pemerintah kedua negara. Hubungan yang paling mendasar diantara kedua komunitas tersebut adalah berupa hubungan perdagangan lintas batas secara informal.

Saran

Dari kesimpulan yang telah disajikan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan melihat peningkatan intensitas aktifitas perdagangan di daerah perbatasan yang selama ini berlangsung secara informal, sangat perlu segera dibuka hubungan perdagangan lintas kedua negara (Indonesia dengan Malaysia) secara formal.
2. Bila perlu dibentuk lembaga khusus yang merencanakan, dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan hubungan perdagangan lintas batas tersebut.
3. Perlunya alokasi dana yang cukup baik dari APBN maupun APBD dalam rangka mempercepat terwujudnya sarana infrastruktur yang layak, khususnya jalan dan jembatan dalam rangka menghubungkan Kecamatan Kayan Hulu dengan daerah perbatasan, sehingga dalam jangka panjang dapat menunjang pengembangan potensi ekonomi rakyat yang selama ini masih tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, D., 1996. *Perencanaan Pembangunan Industri dan Perdagangan*, Prisma (ed. 25 Th. 1971-1996, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Amir,M.S., 2000. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Ppm, Jakarta.
- Anonymous, 2002. *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*, Depkimpraswil, Jakarta.
- Billa, Mathin, 2005. *Peran Perdagangan Lintas Batas Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malinau Kalimantan Timur*, Disertasi, PPS Unibraw, Malang
- Budiman, A., 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartasasmita, G., 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Mubyarto, 1999. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Patton, A., 1999. *Pembangunan Desa Perbatasan (Suatu Kajian tentang Proses, Tantangan, dan Peluang Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nawang Baru Kabupaten Bulungan)*, Thesis, PPS Unibraw, Malang.
- Todaro, M. P., 1990. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (jilid.2, ed. 3), Erlangga, Jakarta.
- Garis Garis Besar Haluan Negara tahun 2000-2004
- Renstra BPKP2DT Kaltim tahun 2011